



**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RKPD PROVINSI BANTEN**

**TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai pencapaian atas kinerja sasaran, program kegiatan yang telah ada dalam dokumen RKPD Tahun 2024 Provinsi Banten beserta kendala/permasalahan serta rencana tindak lanjut dalam penyelesaiannya.

Dalam rangka penjabaran pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Tahunan didaerah yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 245 dimana menjelaskan bahwa Kepala Bappeda Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi.

Laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan III Tahun Anggaran 2024 diharapkan dapat membantu dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan serta bermanfaat bagi pihak terkait dalam melaksanakan pembangunan daerah di Wilayah Provinsi Banten.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, November 2024

KEPALA,

Ttd.

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
NIP. 19690219 200112 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Ruang Lingkup	I - 2
1.3. Dasar Hukum	I - 3
1.4. Tujuan.....	I - 4
1.5. Metode Evaluasi RKPD.....	I - 5
1.6. Sistematika Penulisan	I - 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024	II - 1
2.1. Keselarasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2024	II - 1
2.2. Keselarasan Rencana Tujuan dan Sasaran Daerah 2024	II - 2
2.3. Realisasi APBD Triwulan III 2024	II - 7
BAB III PELAKSANAAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024.....	III - 1
3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro	III - 1
3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024	III - 11
3.3. Rekapitulasi Realisasi Kinerja Urusan Triwulan III Tahun 2024	III - 14
BAB IV ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	IV - 1
4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Triwulan III 2024	IV - 1
4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah	IV - 2
4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan	IV - 5
BAB V PENUTUP.....	V - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan teknis, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi, yang mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi, dan digunakan untuk mengetahui:

1. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; dan
2. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi RPJMD dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

Bappeda melaksanakan evaluasi berupa pemantauan dan supervisi setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah provinsi. Hasil evaluasi dimaksud digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan RKPD provinsi tahun berikutnya. Kemudian Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

1.2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti atau merupakan turunan dari perencanaan pembangunan yang mempunyai lingkup lebih luas dan waktu yang lebih lama;
3. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara objektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah

dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 ;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.4. TUJUAN

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD/RPD dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dapat menjamin bahwa:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
2. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
3. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD Provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
4. Sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD Provinsi

1.5. METODE EVALUASI RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi, dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan, dan Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada Gubernur, kemudian Gubernur menyampaikan laporan ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

3. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pada kegiatan pengendalian evaluasi yang didokumentasikan dalam buku ini adalah evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2024. Adapun metode evaluasi RKPD Provinsi Banten menggunakan:

- a. Pendekatan *gap analysis* (analisis kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD;
- b. Evaluasi Indikator kinerja kegiatan/program pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD (hingga Triwulan III). Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan.

Tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Bappeda Provinsi Banten menghimpun dokumen hasil realisasi kinerja seluruh Perangkat Daerah, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- b. Hasil realisasi kinerja dan anggaran pada Triwulan III Tahun 2024.

2. Pelaksanaan

Bappeda Provinsi Banten melakukan evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2024 melalui input realisasi kinerja dan keuangan dari seluruh Perangkat Daerah, berdasarkan input tersebut seluruh Pendamping Perangkat Daerah melakukan verifikasi, analisis dokumen dan menelaah keterkaitan antar dokumen hasil realisasi kinerja Triwulan, dalam hal ditemukan

adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Renstra dan Renja Perangkat Daerah kemudian dicatat untuk dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

3. Pelaporan

Kepala Bappeda menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan hasil akhir verifikasi Pendamping dari seluruh Perangkat Daerah.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan III tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

BAB III : EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

BAB IV : ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan terhadap Kebijakan umum dan Program pembangunan dan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2024. Pada tahun pengendalian 2024 ini dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang merupakan pengganti RPJMD 2017-2022 yang telah berakhir periodesasinya.

2.1. Keselarasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2024

Hasil dari pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2024 terhadap RPD 2023-2026 seperti pada tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Keselarasan Pelaksanaan RKPD Tahun 2024

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Keselarasan Kebijakan umum dan Program pembangunan tahun 2024						
Prioritas dan Sasaran Pembangunan	KUA	√	-	-	-	-

RKPD dan Kumpulan Renja Perangkat Daerah	APBD dan Laporan Triwulan	Kesesuaian		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Rencana program dan kegiatan prioritas, dan pagu indikatif	PPAS	√	-	-	-	-
Keselarasan rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2024						
Program dan kegiatan seluruh Renja Perangkat Daerah	RKA Perangkat Daerah	√	-	-	-	-
Realisasi Capaian Kinerja						
Realisasi Pencapaian Target	Triwulanan					
Penyerapan Dana	Triwulanan					
Kendala Pelaksanaan	Triwulanan					

Sumber: BAPPEDA Provinsi Banten

2.2. Keselarasan Rencana Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang terdapat dalam dikumen RPD, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 dan program pembangunan tahun 2024 harus berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, visi misi yang digunakan pada RPD mengacu pada dokumen RPJPD 2005-2025 yang diselaraskan dengan mendukung tujuan dan

sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 seperti pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2.
Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Target 2024 RKPD-P
1	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	6,1	6,17	5,94	5,67-5,97
		Tingkat Pengangguran Terbuka	7,9	7,52	8,51	7,02-7,52
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	73,59	75,25	73,55	76,02
	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	58,13	53,56	63,46	63,46
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,665	0,6803	0,675	0,68
	Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,74	7,12	7,75	7,75
	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	65,19	65,94	65,54	64,9
	Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,11	9,15	9,20	9,23
	dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,75	13,09	13,93	13,93
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,4	74,77	70,54	74,8
		Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	23,5	20	23,00	23,00
	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,07	92,18	93,35	93,35

No	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Target 2024 RKPD-P
	Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	55,03	51,41	56,23	56,23
		Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	49,42	49,28	50,17	50,17
2	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,70-5,2	4,81	5,11-5,25	4,8-5,0
		Indeks Williamson	0,625	0,62	0,620	0,620
		Indeks Gini	0,363	0,368	0,349	0,365
	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,97	3,43	4,92	4,92
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,99	5,82	5,06	5,82
		LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	2,44	3,98	3,04	3,04
	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,39	5,1	4,48	4,48
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,68	0,14	0,80	0,80
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	tinggi	tinggi	tinggi	tinggi
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.168	12.601	12.303	12.674
3	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	17	14,82	18,00	18,00
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,99	63,52	63,04	63,5
	Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	147,37	144,51	145,31	145,31

No	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Target 2024 RKPD-P
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	66	78,17	71	78,17
	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	69,77	67,74	73,16	73,16
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	82,2	77,012	84,30	84,30
		Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2-3	3,2	2-3	2-3
		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan publik (satuan: nilai)	3,47	3,74	3,49	3,74
	Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh

Sumber: RPD 2023-2026 Provinsi Banten

Guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2024, ditetapkan pagu indikatif program sesuai dengan prioritas, seperti pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	22
2	Dinas Kesehatan	5	16
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	24
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	19
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	12
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12
7	Dinas Sosial	6	18
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	20
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	14	36
10	Dinas Ketahanan Pangan	5	13
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15	29
12	Dinas Pemberdayaan	5	12

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
	Masyarakat dan Desa		
13	Dinas Perhubungan	4	16
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	13
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	14
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	14
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	14
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	28
20	Dinas Pariwisata	5	17
21	Dinas Pertanian	7	23
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	17
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	22
24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	11
25	Biro Hukum	2	7
26	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2	7
27	Biro Umum dan Perlengkapan	1	10
28	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2	8
29	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	9
30	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	1	7
31	Sekretariat DPRD	2	17
32	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4	19
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	15
34	Badan Pendapatan Daerah	2	9
35	Badan Kepegawaian Daerah	2	12
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	10
37	Badan Penghubung	2	7
38	Inspektorat	3	12
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12
JUMLAH		309	938

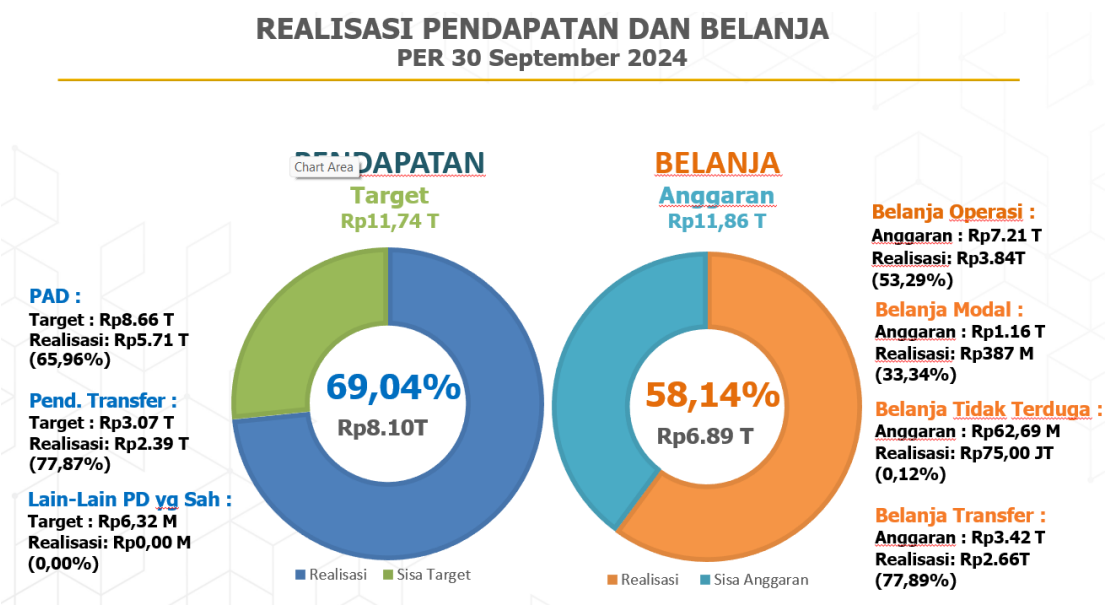
Sumber: BPKAD Provinsi Banten

Dalam RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026 direncanakan terdapat 176 Program, dan dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2023 direncanakan sebanyak 309 program dan 938 Kegiatan yang tersebar ke seluruh Perangkat

Daerah yang ditetapkan dalam RKPD. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian nomenklatur program yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Apabila merujuk pada hasil pemetaan terhadap program RPD dan Program nomenklatur, secara keseluruhan mengindikasikan bahwa seluruh program yang ada di dalam RPD dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan urusannya masing-masing.

2.3. Realisasi APBD TW III 2024

Dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2024 direncanakan sebanyak 309 program yang direncanakan dalam APBD. Berikut hasil realisasi APBD TW III 2024 yaitu untuk Pendapatan Asli Daerah dengan pagu 11,74 Triliun terealisasi 8,10 Triliun atau sebesar 69,04 persen sedangkan belanja daerah dengan pagu Rp 11.86 T,- dengan realisasi Rp 6,89 T atau sebesar 58,14 persen di TW III 2024.



Sumber: BPKAD Provinsi Banten

Gambar 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja TA.2024 Provinsi Banten TW III

Tabel 2.4 Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah TW III 2024

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.738.634.370.426,00	1.566.096.301.742,00	57,19
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.738.634.370.426,00	1.566.096.301.742,00	57,19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.346.163.189.976,00	839.750.383.744,00	62,38
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.389.446.288.168,00	723.944.871.608,00	52,10
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	623.800.000,00	308.677.800,00	49,48
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.301.402.282,00	2.085.876.250,00	90,64
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	99.690.000,00	6.492.340,00	6,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.162.691.308.183,00	631.180.111.515,00	54,29
DINAS KESEHATAN	1.162.691.308.183,00	631.180.111.515,00	54,29
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	612.875.797.908,00	305.420.388.571,00	49,83
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	519.478.353.691,00	308.334.692.008,00	59,35
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	27.639.731.584,00	15.577.429.936,00	56,36
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	593.160.000,00	544.866.000,00	91,86
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.104.265.000,00	1.302.735.000,00	61,91
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.068.133.865.461,00	513.019.077.750,00	48,03
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.068.133.865.461,00	513.019.077.750,00	48,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	130.413.693.868,00	89.129.577.740,00	68,34
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	156.207.920.452,00	60.895.434.528,00	38,98
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.810.946.700,00	1.635.318.095,00	11,84
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	5.016.278.300,00	432.840.500,00	8,63

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.465.475.300,00	607.774.200,00	24,65
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	63.062.656.950,00	31.257.918.731,00	49,57
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	27.393.542.400,00	5.538.846.300,00	20,22
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	660.456.916.697,00	318.746.136.975,00	48,26
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.461.771.290,00	3.133.977.726,00	57,38
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.844.663.504,00	1.641.252.955,00	42,69
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	396.030.867.046,00	30.812.305.352,00	7,78
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	396.030.867.046,00	30.812.305.352,00	7,78
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.472.905.897,00	17.778.111.043,00	58,34
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	35.687.157.348,00	7.460.550.457,00	20,91
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.287.818.653,00	1.766.248.220,00	19,02
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	320.465.785.148,00	3.720.138.852,00	1,16
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	117.200.000,00	87.256.780,00	74,45
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	86.713.811.087,00	54.929.359.312,00	63,35
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	46.333.243.670,00	30.301.831.678,00	65,40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.958.923.350,00	26.401.736.278,00	66,07
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.405.608.400,00	2.960.266.300,00	67,19
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.968.711.920,00	939.829.100,00	47,74
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	40.380.567.417,00	24.627.527.634,00	60,99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.912.044.892,00	15.674.753.588,00	58,24
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	13.468.522.525,00	8.952.774.046,00	66,47
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	116.443.780.708,00	51.043.619.244,00	43,84

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
DINAS SOSIAL	116.443.780.708,00	51.043.619.244,00	43,84
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.720.103.708,00	21.607.940.089,00	45,28
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.481.415.000,00	2.142.961.980,00	61,55
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000,00	22.140.000,00	29,52
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	12.503.047.600,00	3.858.439.760,00	30,86
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	50.407.066.400,00	21.544.747.270,00	42,74
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2.257.148.000,00	1.867.390.145,00	82,73
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	98.218.677.535,00	62.274.849.179,00	63,40
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	98.218.677.535,00	62.274.849.179,00	63,40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	79.094.852.690,00	49.708.896.331,00	62,85
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	247.685.900,00	69.321.498,00	27,99
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	11.580.088.945,00	8.874.462.400,00	76,64
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.151.771.000,00	962.896.700,00	30,55
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.982.518.000,00	2.054.806.250,00	68,90
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.161.761.000,00	604.466.000,00	52,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	35.369.216.438,00	23.626.467.462,15	66,80
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	35.369.216.438,00	23.626.467.462,15	66,80
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.512.386.978,00	15.621.973.005,00	66,44
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.790.409.960,00	2.005.655.029,15	71,88
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.560.833.700,00	1.270.275.860,00	81,38
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.933.681.900,00	1.330.879.307,00	45,37
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	100.000.000,00	72.831.000,00	72,83

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.249.552.000,00	1.639.966.261,00	72,90
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.222.351.900,00	1.684.887.000,00	75,82
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	30.691.088.026,00	14.335.093.266,00	46,71
DINAS KETAHANAN PANGAN	30.691.088.026,00	14.335.093.266,00	46,71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.177.084.026,00	12.743.260.892,00	54,98
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	50.000.000,00	38.960.000,00	77,92
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.459.004.000,00	1.187.581.874,00	21,75
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.475.000.000,00	168.496.200,00	11,42
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	530.000.000,00	196.794.300,00	37,13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	200.000.000,00	99.541.000,00	49,77
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	200.000.000,00	99.541.000,00	49,77
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	100.000.000,00	55.941.000,00	55,94
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	50.000.000,00	25.800.000,00	51,60
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	50.000.000,00	17.800.000,00	35,60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	62.626.242.726,00	43.855.262.260,00	70,03
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	62.626.242.726,00	43.855.262.260,00	70,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.493.357.726,00	34.268.017.423,00	66,55
PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	577.907.600,00	548.238.650,00	94,87
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.569.950.000,00	2.273.368.877,00	88,46
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.000.000,00	0,00	-
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000,00	49.163.820,00	98,33
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	142.092.400,00	103.865.000,00	73,10

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	65.000.000,00	0,00	-
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	990.000.000,00	644.023.690,00	65,05
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000,00	145.159.000,00	96,77
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	225.000.000,00	163.445.000,00	72,64
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.312.935.000,00	5.659.980.800,00	89,66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.208.455.200,00	624.476.401,00	51,68
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.208.455.200,00	624.476.401,00	51,68
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	669.697.000,00	391.185.000,00	58,41
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	262.237.000,00	91.715.500,00	34,97
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	220.854.200,00	89.523.221,00	40,53
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	55.667.000,00	52.052.680,00	93,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	38.158.393.528,00	21.707.700.787,00	56,89
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	38.158.393.528,00	21.707.700.787,00	56,89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.445.400.458,00	10.738.290.497,00	52,52
PROGRAM PENATAAN DESA	242.500.000,00	153.202.200,00	63,18
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	704.420.000,00	408.996.500,00	58,06
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.741.248.000,00	926.200.000,00	53,19
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	15.024.825.070,00	9.481.011.590,00	63,10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.301.415.880,00	4.915.472.310,93	78,01
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	6.301.415.880,00	4.915.472.310,93	78,01
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.011.433.000,00	829.364.271,00	82,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.729.964.080,00	1.348.130.851,00	77,93

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.560.018.800,00	2.737.977.188,93	76,91
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	111.516.129.104,00	48.943.162.315,00	43,89
DINAS PERHUBUNGAN	111.516.129.104,00	48.943.162.315,00	43,89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.981.549.824,00	26.438.355.889,00	61,51
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	64.588.526.280,00	21.728.110.981,00	33,64
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.720.000.000,00	392.280.195,00	22,81
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.226.053.000,00	384.415.250,00	17,27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60.818.956.871,00	36.400.313.798,00	59,85
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	60.818.956.871,00	36.400.313.798,00	59,85
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.262.377.988,00	12.442.226.486,00	58,52
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	15.069.291.350,00	9.851.168.510,00	65,37
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	24.487.287.533,00	14.106.918.802,00	57,61
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	29.377.143.873,00	18.139.010.180,00	61,75
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	29.377.143.873,00	18.139.010.180,00	61,75
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.437.559.578,00	12.844.490.735,00	66,08
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.138.489.000,00	1.777.825.416,00	56,65
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	640.756.000,00	477.215.600,00	74,48
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.310.000.000,00	1.072.931.310,00	81,90
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.300.000.000,00	1.370.858.337,00	59,60
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.550.339.295,00	595.688.782,00	23,36
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	34.618.855.712,00	18.593.179.875,00	53,71
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	34.618.855.712,00	18.593.179.875,00	53,71

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.227.178.712,00	14.769.205.325,00	66,45
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.625.000.000,00	328.845.550,00	12,53
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	7.100.000.000,00	2.226.559.100,00	31,36
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	800.000.000,00	606.608.900,00	75,83
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.666.677.000,00	496.639.000,00	29,80
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	200.000.000,00	165.322.000,00	82,66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	103.706.397.090,00	75.981.055.157,00	73,27
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	103.706.397.090,00	75.981.055.157,00	73,27
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.474.819.170,00	14.674.408.233,00	55,43
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.560.016.200,00	2.271.293.370,00	63,80
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAAHRAGAAN	72.196.561.720,00	58.255.353.554,00	80,69
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.475.000.000,00	780.000.000,00	52,88
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.072.042.300,00	741.631.160,00	69,18
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.072.042.300,00	741.631.160,00	69,18
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.072.042.300,00	741.631.160,00	69,18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.550.966.000,00	852.887.175,00	33,43
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.550.966.000,00	852.887.175,00	33,43
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.550.966.000,00	852.887.175,00	33,43
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.441.376.000,00	2.475.905.038,00	33,27
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7.441.376.000,00	2.475.905.038,00	33,27
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.215.050.000,00	1.401.378.000,00	43,59
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.615.652.800,00	340.117.600,00	21,05

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.610.673.200,00	734.409.438,00	28,13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	30.656.975.808,00	17.768.020.894,00	57,96
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	30.656.975.808,00	17.768.020.894,00	57,96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.307.171.808,00	16.357.179.900,00	57,78
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.349.804.000,00	1.410.840.994,00	60,04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.181.998.700,00	1.575.498.630,00	72,20
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.181.998.700,00	1.575.498.630,00	72,20
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	772.422.000,00	484.913.450,00	62,78
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	1.409.576.700,00	1.090.585.180,00	77,37
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	75.537.415.952,00	36.997.266.115,00	48,98
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	75.537.415.952,00	36.997.266.115,00	48,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	44.796.729.949,00	27.989.545.140,00	62,48
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.386.179.210,00	723.659.160,00	52,21
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	19.944.287.400,00	3.462.459.920,00	17,36
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.859.049.393,00	3.523.820.618,00	51,37
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	560.000.000,00	421.494.000,00	75,27
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.991.170.000,00	876.287.277,00	44,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	49.091.421.689,00	31.721.903.530,00	64,62
DINAS PARIWISATA	49.091.421.689,00	31.721.903.530,00	64,62
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.026.198.489,00	13.540.635.140,00	64,40
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18.465.223.200,00	11.732.502.222,00	63,54
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6.000.000.000,00	4.104.957.973,00	68,42

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.000.000.000,00	484.757.840,00	48,48
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.600.000.000,00	1.859.050.355,00	71,50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	111.587.238.138,00	63.124.009.803,00	56,57
DINAS PERTANIAN	111.587.238.138,00	63.124.009.803,00	56,57
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	73.043.629.738,00	44.700.515.288,00	61,20
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	23.596.987.000,00	11.176.167.870,00	47,36
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.846.632.000,00	929.450.100,00	32,65
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.290.000.000,00	1.264.438.345,00	55,22
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.657.101.100,00	599.784.800,00	36,19
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	120.000.000,00	56.370.000,00	46,98
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	8.032.888.300,00	4.397.283.400,00	54,74
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	4.292.500.000,00	2.695.292.908,00	62,79
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	4.292.500.000,00	2.695.292.908,00	62,79
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.327.500.000,00	1.473.612.838,00	63,31
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.395.000.000,00	805.103.070,00	57,71
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	310.000.000,00	189.015.500,00	60,97
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	260.000.000,00	227.561.500,00	87,52
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	47.336.127.192,00	30.610.700.532,00	64,67
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	47.336.127.192,00	30.610.700.532,00	64,67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.736.520.342,00	16.555.736.558,00	64,33
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1.069.485.650,00	392.989.920,00	36,75
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	850.800.000,00	510.878.400,00	60,05

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	719.690.400,00	118.463.800,00	16,46
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	18.959.630.800,00	13.032.631.854,00	68,74
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10.014.894.400,00	4.386.181.912,00	43,80
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.014.894.400,00	4.386.181.912,00	43,80
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	275.000.000,00	188.083.616,00	68,39
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	595.000.000,00	235.679.148,00	39,61
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	1.822.513.200,00	855.718.163,00	46,95
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.000.000.000,00	571.324.265,00	57,13
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	5.822.381.200,00	2.265.230.563,00	38,91
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	500.000.000,00	270.146.157,00	54,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	41.444.397.925,00	25.358.287.511,00	61,19
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	41.444.397.925,00	25.358.287.511,00	61,19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.479.397.925,00	22.731.784.758,00	60,65
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.400.000.000,00	2.302.002.792,00	67,71
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	450.000.000,00	261.180.000,00	58,04
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	115.000.000,00	63.319.961,00	55,06
SEKRETARIAT DAERAH	252.678.219.190,00	152.859.071.132,00	60,50
SEKRETARIAT DAERAH	252.678.219.190,00	152.859.071.132,00	60,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	222.559.339.560,00	132.348.917.779,00	59,47
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.210.000.000,00	1.209.714.508,00	54,74
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.840.000.000,00	924.521.455,00	50,25
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.940.019.130,00	15.253.684.314,00	76,50

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.364.841.300,00	1.289.242.080,00	54,52
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.580.000.000,00	951.320.413,00	60,21
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	987.319.200,00	640.248.875,00	64,85
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.196.700.000,00	241.421.708,00	20,17
SEKRETARIAT DPRD	476.860.892.593,00	295.018.656.361,00	61,87
SEKRETARIAT DPRD	476.860.892.593,00	295.018.656.361,00	61,87
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	245.602.936.293,00	139.647.084.561,00	56,86
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	231.257.956.300,00	155.371.571.800,00	67,19
PERENCANAAN	56.650.193.305,00	34.347.763.788,00	60,63
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	56.650.193.305,00	34.347.763.788,00	60,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45.133.208.425,00	28.714.416.000,00	63,62
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	7.116.984.880,00	3.813.331.324,00	53,58
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.400.000.000,00	1.820.016.464,00	41,36
KEUANGAN	3.846.915.483.715,00	3.161.071.123.759,00	82,17
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.540.781.437.886,00	2.949.254.498.995,00	83,29
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.712.752.350,00	27.391.890.739,00	64,13
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.491.326.009.276,00	2.919.726.702.179,00	83,63
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.742.676.260,00	2.135.906.077,00	31,68
BADAN PENDAPATAN DAERAH	306.134.045.829,00	211.816.624.764,00	69,19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	289.027.581.749,00	201.571.146.584,00	69,74
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17.106.464.080,00	10.245.478.180,00	59,89
KEPEGAWAIAN	41.293.444.826,00	25.993.982.185,00	62,95

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	41.293.444.826,00	25.993.982.185,00	62,95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.265.924.506,00	21.052.040.794,00	61,44
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	7.027.520.320,00	4.941.941.391,00	70,32
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	68.077.323.028,00	33.707.876.937,00	49,51
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	68.077.323.028,00	33.707.876.937,00	49,51
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.041.009.938,00	23.966.804.100,00	63,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	30.036.313.090,00	9.741.072.837,00	32,43
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.202.355.966,00	499.617.950,00	22,69
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.202.355.966,00	499.617.950,00	22,69
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.202.355.966,00	499.617.950,00	22,69
PENGLOLAAN PENGHUBUNG	11.456.796.910,00	7.568.876.688,00	66,06
BADAN PENGHUBUNG	11.456.796.910,00	7.568.876.688,00	66,06
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.835.319.421,00	6.506.235.003,00	66,15
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.621.477.489,00	1.062.641.685,00	65,54
INSPEKTORAT DAERAH	72.775.660.109,00	44.346.476.556,00	60,94
INSPEKTORAT	72.775.660.109,00	44.346.476.556,00	60,94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.722.444.948,00	43.414.698.484,00	61,39
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.562.400.500,00	673.898.072,00	43,13
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	490.814.661,00	257.880.000,00	52,54
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	472.432.707.399,00	430.083.550.707,00	91,04
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	472.432.707.399,00	430.083.550.707,00	91,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.952.581.999,00	13.762.036.428,00	59,96

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.990.000.000,00	4.326.318.023,00	54,15
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	391.721.615.000,00	366.479.684.766,00	93,56
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.327.127.400,00	1.194.103.600,00	89,98
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	4.757.873.000,00	2.449.798.104,00	51,49
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	43.683.510.000,00	41.871.609.786,00	95,85
	11.866.009.406.039,00	7.620.380.940.177,08	64,22

Sumber: BPKAD Provinsi Banten

BAB III
HASIL PELAKSANAAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan tingkat inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Provinsi Banten pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.1.

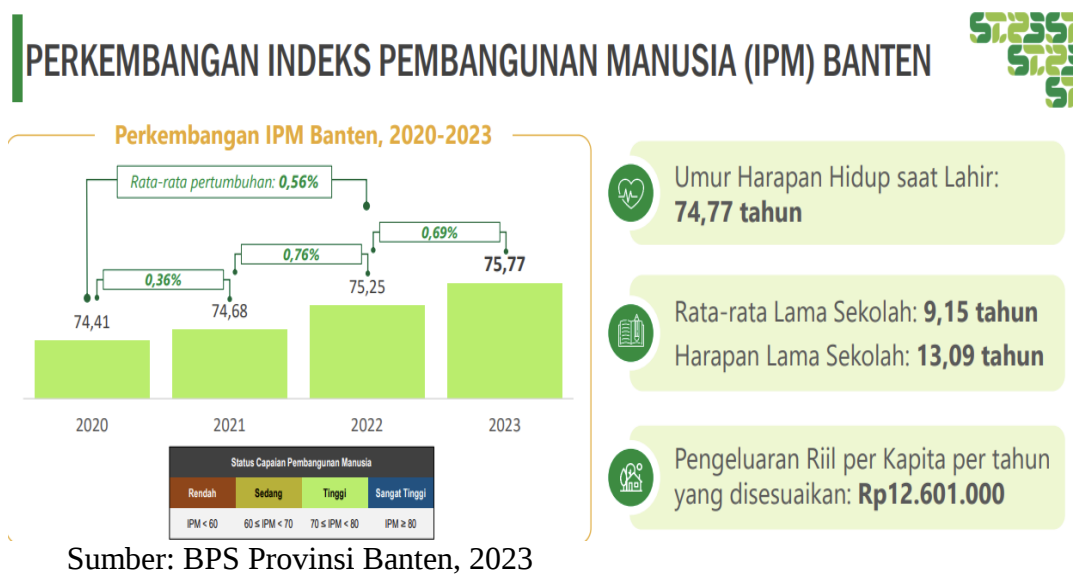
Tabel 3.1.
Realisasi Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Target P-RKPD 2024	Realisasi Triwulan s/d TW III	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,25	76,02	75,77	Progress
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,81	4,8-5,0	4,93	Progress
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	7,52	7,02-7,52	7,02	Tercapai
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,17	5,67-5,97	5,84	Tercapai
5	Indeks Gini	poin	0,368	0,365	0,353	Tercapai

Sumber: RKPD 2024, BPS Provinsi Banten

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).



Gambar 3.1
Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2020-2023

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten terepresentasikan melalui capaian IPM Banten Tahun 2023. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2023 sebesar 75,77 poin, adapun target IPM pada tahun 2024 yang tercantum di Dokumen RKPD 2024 adalah sebesar 73,55.

Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2023 termasuk pada klasifikasi “tinggi” dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,69% poin dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,56 pada kurun waktu 2020-2023. Secara nasional IPM Provinsi Banten lebih baik dari IPM nasional yaitu poin, dimana Banten menempati peringkat ke-8 dengan status IPM tertinggi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2022 mencapai 70,39 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2022 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 70 tahun. Sepanjang periode 2010 hingga 2022, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,89 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 telah mencapai 13,09 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2023, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2023 telah mencapai 9,15 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2023 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III). Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain; 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang sudah memenuhi kriteria minimal 20% ; 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang sudah sesuai ketentuan minimal 10%; 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Dukungan pemerintah kabupaten kota dan peran serta dunia

usaha/masyarakat dalam rangka penyediaan RS Swasta di Banten; 4) Kemudahahan perijinan pendirian RS dan lembaga pendidikan dan pelatihan mandiri; 5) Daya beli masyarakat semakin meningkat. Strategi kedepan RS Daerah yang telah dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan memadai dan sumber daya kesehatan yang mumpuni menuju *health tourism*

Tabel 3.2
Target Komponen Indikator IPM Tahun 2024

No	Indikator IPM	Target Tahun 2024
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,54 Tahun
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,93 Tahun
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,20 Tahun
4	Pengeluaran Perkapita	Rp. 12.674.000

Sumber:BPS Provinsi Banten

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,02- 5,15 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten Nomor. No. 54/11/36/Th.XVIII, 5 November 2024, realisasi laju Pertumbuhan ekonomi Banten di Tahun 2024 (y on y) sebesar 4,93 persen secara q-to-q tumbuh 0,96 persen. Secara c-to c tumbuh 4,71 persen.



Sumber : BPS Provinsi Banten

3.2 Gambar Pertumbuhan Ekonomi Banten 2021-2024 (y on y)

Pertumbuhan global diperkirakan sebesar 3,2 persen pada tahun 2024, diproyeksikan akan berlanjut dengan pertumbuhan yang sama pada tahun 2024 dan 2025. Negara berkembang sendiri di proyeksikan tumbuh 4,2 persen. Ekonomi global masih dalam tekanan terdampak ketegangan geopolitik, diantaranya perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, dan ancaman cuaca ekstrim.

Dari sisi pengeluaran, ekonomi Banten pada triwulan III-2024 terhadap triwulan II2024 tumbuh sebesar 0,96 persen. Komponen Pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 3,12 persen. Disusul komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 1,06 persen. Sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi, yakni komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi sebesar 7,59 persen, diikuti komponen Pengeluaran lembaga Non-Profit (PK-LNPRT) dan komponen Total Net Ekspor masing-masing mengalami kontraksi sebesar 5,84 persen dan 3,18 persen

Ekonomi Banten triwulan III-2024 tumbuh sebesar 0,96 persen (q-to-q) disbanding triwulan II-2024. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi di antaranya Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,02 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,34 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 2,26 persen. Lima lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Banten, yang pada triwulan III-2024 ini mengalami pertumbuhan di antaranya adalah Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,57 persen; Konstruksi sebesar 1,40 persen; Real Estat sebesar 0,96 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,24 persen. Sementara, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terkontraksi sebesar sebesar 2,73 persen.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi didukung oleh berbagai strategi dan kebijakan antara lain: 1) Mempermudah perijinan sehingga investasi di Provinsi Banten; 2) Meningkatkan infrastruktur di Kawasan industri; 3) konektivitas jaringan jalan

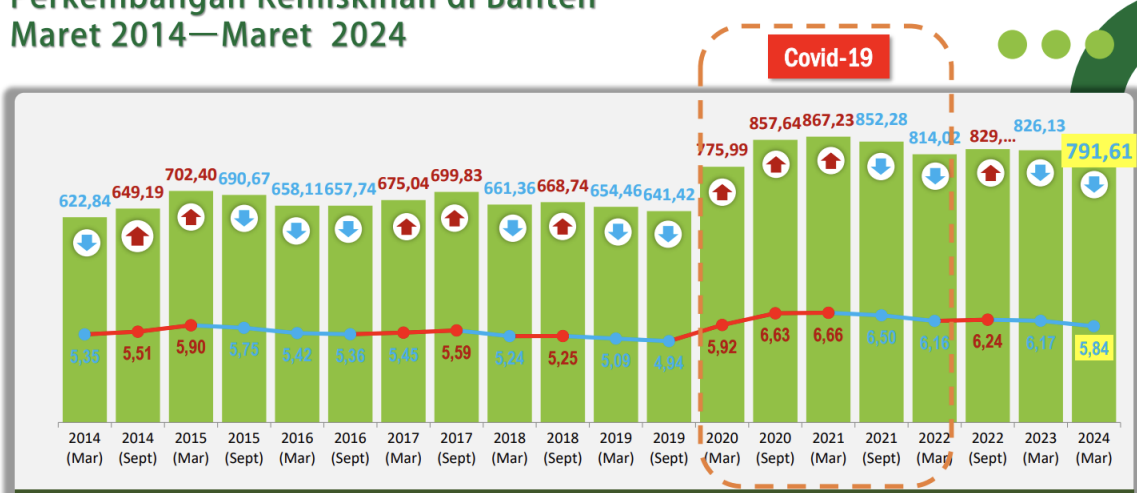
Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten

Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha tahun 2023-2024

3.1.3. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten No. 34/07/36/Th.XVIII, 1 Juli 2024, Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2024 sebesar 5,84 persen dengan target di 2024 sebesar 5,58 persen. Jumlah Penduduk Miskin pada Maret 2024 sebesar 791,61 ribu orang, turun 34,5 ribu orang terhadap Maret 2023 ▪ Persentase Penduduk Miskin pada Maret 2024 sebesar 5,84 persen, turun 0,33 poin persen terhadap Maret 2023

Perkembangan Kemiskinan di Banten
Maret 2014—Maret 2024



Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten 2024

Gambar 3.4 Perkembangan Kemiskinan 2014-2024

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 5,69 persen, turun 0,31 poin dibandingkan pada Maret 2023. Hal lainnya menunjukan persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 6,44 persen, turun 0,35 persen poin jika dibandingkan pada Maret 2023. Turunnya angka kemiskinan di Banten yang sudah semakin baik perlu juga melihat persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan

jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,204 pada Maret 2023 menjadi 0,971 pada Maret 2024. Indeks Keparahkan Kemiskinan juga turun dari 0,363 menjadi 0,247 pada periode yang sama.

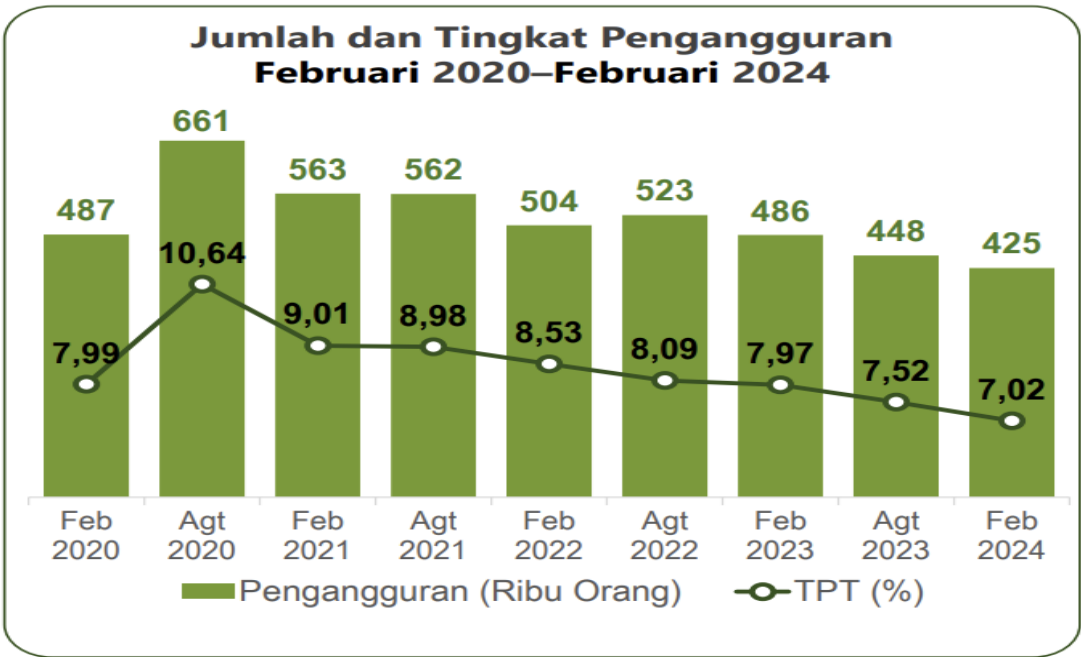
Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 654.213,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp474.039,- (72,46 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp180.174,- (27,54 persen). Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 5,09 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp3.329.944,-/rumah tangga miskin/bulan.

Provinsi Banten dalam rangka penurunan kemiskinan telah melaksanakan berbagai program pembangunan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai urusan pemerintahan antara lain: 1).cPembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dalam rangka percepatan arus orang, mobilisasi barang, dan jasa semakin meningkat. 2). Pembangunan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni. 3). Penanganan kemiskinan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

3.1.4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada Tahun 2023 terjadi penurunan TPT dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan pulihnya perekonomian nasional dan mengeliatnya kembali ekonomi global walaupun banyak ketidakpastian akibat perang dan dampak masifnya penggunaan IOT dimana banyak pekerjaan yang berkurang memakai tenaga manusia. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten No. 24/05/36/Th.XVIII, 6 Mei 2024. TPT Provinsi Banten menurun pada periode Februari Tahun 2024 yaitu sebesar 7,02%, menurun 0,5 poin dari tahun

sebelumnya, walaupun posisinya dibawah nasional dengan angka TPT nasional sebesar 4,82%, dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2024 Target Tingkat Pengangguran Terbuka adalah sebesar 7,02-7,52%, dimana melihat kondisi ini angka capaian TPT 2024 telah tercapai.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

Gambar 3.5
Tingkat pengangguran Terbuka tahun 2017-2024 Provinsi Banten

Penduduk usia kerja pada Februari sebanyak 9,32 juta orang, dengan jumlah Angkatan kerja sebanyak 6,05 juta orang dan bukan Angkatan kerja sebanyak 3,27 juta orang dan sebanyak 424,69 ribu orang menganggur. Terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 8,03 ribu orang sepanjang periode Februari 2023 – Februari 2024, Dimana penduduk bekerja pada kegiatan informal mengalami peningkatan dibanding Februari 2023 sebesar 3,26 persen poin. Namun proporsi penduduk bekerja paling banyak dengan status buruh/karyawan/pegawai sebanyak 46,65% bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan sektor kedua adalah berusaha sendiri/wiraswasta sebanyak 18,45%.

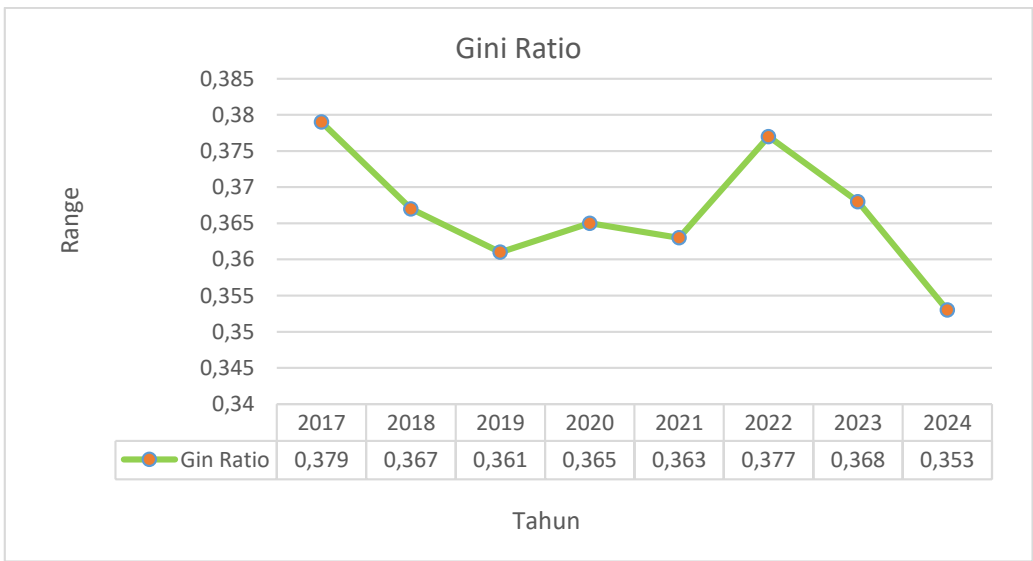
Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pengangguran Provinsi Banten mengalami kecenderungan yang terus menurun. Hal ini tentunya adanya berbagai upaya sinergis yang dilakukan baik dari program pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun pendukung penurunan TPT antara lain: 1). Pendidikan vokasi didesain untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja baik siap bekerja di perusahaan maupun membuka usaha mandiri, contoh SMKN 3 Kota Tangerang dengan jurusan tata boga selalu terserap pada pasar kerja (hotel dan restoran). 2). Pendirian beberapa politeknik seperti pendirian politeknik petrokimia di cilegon, 3). Secara regulasi terdapat Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi sekolah menengah kejuruan sebagai salah satu upaya konkret penanggulangan pengangguran yang berasal dari lulusan SMK, 4). Pendirian beberapa SMK di Banten pada tahun 2024 sebanyak 3 unit sekolah baru, 5). Terdapat pelatihan kerja yang dilakukan oleh BLK. 6). Pengembangan destinasi pariwisata dan UMKM ekonomi kreatif yang semakin memperluas akses ekonomi masyarakat.

3.1.5. Indeks Gini

Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (people prosperity) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (income disparity).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten No. No. 35/07/36/Th.XVIII, 1 Juli 2024, bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode Maret Tahun 2024 mencapai sebesar 0,353 poin yang berarti terdapat penurunan sebesar 0,015 poin dibanding periode Maret 2023 sebesar 0,368. Tingkat ketimpangan penduduk Banten termasuk **Kategori Rendah** (Persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terendah >17 persen). Tercatat bahwa pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada Maret 2024 mengalami penurunan 1,52 poin persen, sementara

pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah naik masing-masing sebesar 0,41 poin persen dan sebesar 1,12 poin persen.



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2024

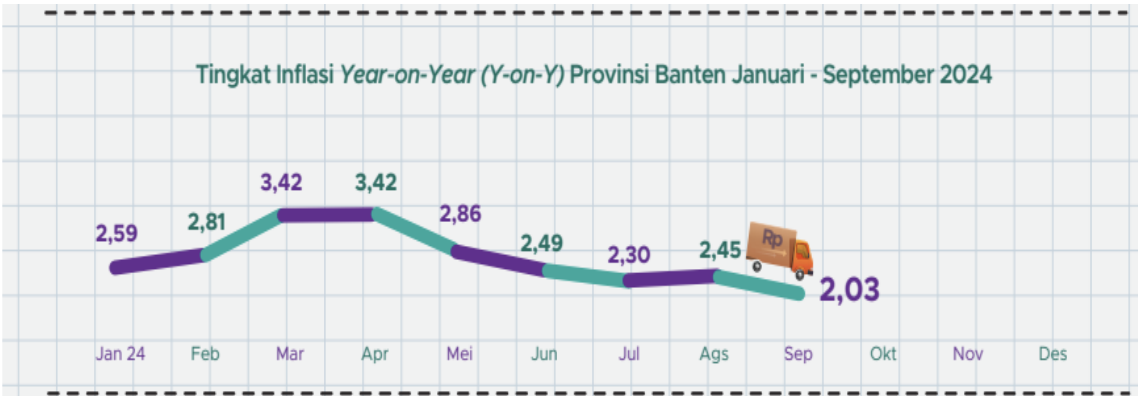
Gambar 3.6
Gini Ratio tahun 2017-2024 Provinsi Banten

3.1.6. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Pada September 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten sebesar 2,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,46. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lebak sebesar 2,24 persen dengan IHK sebesar 105,97. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,02 persen;

kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,88 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,30 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,53 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,73 persen; kelompok transportasi sebesar 0,68 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,13 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,40 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,56 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,59 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,31 persen. © Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Banten bulan September 2024 sebesar 0,26 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,78 persen



Sumber :BPS Provinsi Banten 2024

Gambar 3.7
Perkembangan Inflasi Provinsi Banten

3.2. Realisasi Kinerja Utama Daerah Tahun 2024

Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah tahun 2024 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, adapun realisasi berdasarkan Indikator Pemerintah daerah sebanyak 15 indikator berdasarkan realisasi tahun sebelumnya telah melampaui angka target kerja tahun 2024. Adapun rincian ada dalam tabel dibawah ini;

Tabel.3.3
Realisasi Indikator Kinerja utama Daerah

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target RKPD - P 2024	Realisasi s/d Tw III 2024	Ket
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	persen	6,17	5,67-5,97	5,84	Tercapai

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target RKPD - P 2024	Realisasi s/d Tw III 2024	Ket
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	7,52	7,02-7,52	7,02	Tercapai
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	nilai	75,25	76,02	75,77	progres
Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	nilai	53,56	63,46	53,56	Progress
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	nilai	0,6803	0,68	0,6803	Tercapai
Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	persen	7,12	7,75	7,12	Progress
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	persen	65,94	64,90	64,95	Tercapai
Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	tahun	9,15	9,23	9,15	Progress
dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	tahun	13,09	13,93	13,09	Progress
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	tahun	74,77	74,8	74,77	Progres
	Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	persen	20	23,00	24	Progres
Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	nilai	92,18	93,35	92,18	Progress
Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	nilai	51,41	56,23	51,41	Progress
	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	nilai	49,28	50,17	49,28	Progress
Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,81	4,8-5,0	4,93	Progress
	Indeks Williamson	nilai	0,62	0,620	0,62	Tercapai
	Indeks Gini	nilai	0,368	0,365	0,353	Progress
Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	persen	3,43	4,92	5,44	Progress

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target RKPD - P 2024	Realisasi s/d Tw III 2024	Ket
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	persen	5,82	5,82	3,40	progres
	LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	persen	3,98	3,04	3,72	Tercapai
Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	persen	5,1	4,48	5,1	Tercapai
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	persen	0,14	0,80	1,96	Progress
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	level	tinggi	tinggi	Tinggi	tercapai
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	Ribu Rupiah	12.601	12.674	12.601	Tercapai
Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	persen	14,82	18,00	14,82	Progress
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	nilai	63,52	63,5	62,52	progress
Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	nilai	132,21	145,31	132,21	Tercapai
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	78,17	78,17	78,17	Tercapai
Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	nilai	67,74	73,16	69,23	Progress
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	nilai	77,012	84,30	77,012	Progress
	Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	nilai	3,2	2-3	3,2	Tercapai
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan publik (satuan: nilai)	nilai	3,74	3,74	3,74	tercapai
Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	level	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tercapai

Sumber: Data BPS dan Olahan Bappeda

3.3. Rekapitulasi Realisasi Kinerja Urusan Triwulan III Tahun 2024

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 sebanyak 92 indikator yang menjadi Indikator urusan dan tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat daerah, adapun rincian kinerja terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Rekapitulasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target PRKPD 2024	Realisasi sd TW III	ket
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG PENDIDIKAN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	95,65	100	95,65	
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	85,74	85,74	85,74	tercapai
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	28,76	64	28,76	
Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	11,91	12,2	11,91	
BIDANG KESEHATAN (Dinas Kesehatan)					
Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	66,6	66,6	66,6	tercapai
Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	76,93	92,31	76,93	
Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	69,1	80	69,1	tercapai
Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	5	5	5	Tercapai
Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100		
BIDANG KEBUDAYAAN (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)					
Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,95	3,95	3,95	tercapai
Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	8,3	8,3	8,3	tercapai
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)					

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target PRKPD 2024	Realisasi sd TW III	ket
Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	99,44	94,48	99,44	tercapai
Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	77	60,85	77	tercapai
Luas Permukiman Kumuh	Ha	305	160	209,56	
BIDANG SOSIAL (Dinas Sosial)					
Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	6,10	6,10	6,10	tercapai
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)					
Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	100	100		
Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	6	54,45	6	
Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	0,87	6,47	0,87	
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	96,9	100	96,9	
Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	58,49	66,68	58,49	
Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	28,66	46,09	28,66	
Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	94,25	100	94,25	
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah)					
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,64	0,64	0,63	tercapai
Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100	100	100	Tercapai
Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100	100	100	tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)					
a. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	66,67	74,22	66,67	
b. Indeks Kualitas Air (IKA)		58,93	58,93	58,93	tercapai
c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		82,95	82,95	82,95	tercapai
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKKB)					
Angka Kelahiran Tota TFR (Total Fertility Rate) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	1,96	2,31	1,96	tercapai
BIDANG PENANAMAN MODAL (DPMPTSP)					
Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliyun Rupiah	103,85	90	83,4	
Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	89,72	89,72	89,72	tercapai

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target PRKPD 2024	Realisasi sd TW III	ket
BIDANG KEARSIPAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	BB	BB	BB	
BIDANG PERSANDIAN (Dinas Kominfo)					
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	432	450	432	
BIDANG PANGAN (Dinas Ketahanan Pangan)					
Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	78,71	78,71	78,71	tercapai
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Dinas Komunikasi dan Informatika)					
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	84,61	91,90	84,61	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,39	3,39	3,39	tercapai
BIDANG TENAGA KERJA (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)					
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	64,6	71,85	64,6	
BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (Dinas Pemuda dan Olahraga)					
Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,289	0,53	0,289	
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	52,17	52,17	53,33	
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3AKKB)					
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	68,55	70,76	68,55	
Indek Perlindungan Anak	Nilai	64,33	76,02	64,33	
BIDANG PERPUSTAKAAN (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)					
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	11,55	14	11,55	
Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	66,23	69,30	66,23	
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DP3AKKB)					
Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100	100		
BIDANG STATISTIK (Dinas Kominfo)					
Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100	100		
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH (Dinas Koperasi dan UKM)					
Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	25	28		
Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai kluster	Persen	5	5		
BIDANG PERHUBUNGAN (Dinas Perhubungan)					
Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	21	21	21	tercapai
Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,7	0,73	0,7	
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	80	83,00	80	
BIDANG PERTANAHAN (Dinas Perumahan dan Permukiman)					
Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100	100		
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa)					

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target PRKPD 2024	Realisasi sd TW III	ket
Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	8,24	5,25	8,24	
Persentas Desa Kategori Maju	Persen	12,86	25,50	12,86	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Dinas ESDM)					
Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	59,38	70,01	59,38	
Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	2,39	15	2,39	
Rasio Elektrifikasi	Persen	99,99	99,99	99,99	tercapai
BIDANG KEHUTANAN (DLHK)					
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	39,06	39,06	39,06	tercapai
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (Dinas Kelautan dan Perikanan)					
NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	POIN	100,54	104	97,06	
Tingkat Produksi Sektor Perikanan	Ton	187.309,43	89.563,35		
BIDANG PARIWISATA (Dinas Pariwisata)					
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	25.664.013	21.063.968	20.870.419	
BIDANG PERDAGANGAN (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)					
Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	12,41	13,53	12,30	
BIDANG PERINDUSTRIAN					
Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	30,25	6,44	30,36	tercapai
BIDANG PERTANIAN (Dinas Pertanian)					
Produksi Peternakan	Ton	256.390	256.390		
Produksi Hortikultura	Ton	31.091	31.091		
Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.678.766	2.154.192		
Produksi Perkebunan	Ton	49.205	52.146		
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
SEKRETARIAT DAERAH					
Indeks Kelembagaan	Nilai	84,2	84,2	84,2	tercapai
Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	65	71	65	
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	88,59	88,59	88,59	tercapai
Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	91,16	91,16	91,16	tercapai
Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,24	11,17	10,72	
Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	100		

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target PRKPD 2024	Realisasi sd TW III	ket
Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100	100		
Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	100		
Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	100		
Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100	100		tercapai
Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	3,45	4,29	3,45	
SEKRETARIAT DPRD					
Tingkat Dukungan dan Fasilitasi DPRD	Persen	100	100		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH					
Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	0,5	1		
Maturitas SPIP	Nilai	3,04	3,24	3,04	
Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	15,31	15,31	15,37	tercapai
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEUANGAN					
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	Tercapai
Kemandirian Keuangan	Persen	73,8	73,8	73,8	tercapai
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Indeks Inovasi Daerah	Level	Inovatif (50,41)	Sangat Inovatif	Inovatif (50,41)	Progress
KEPEGAWAIAN					
Indeks Merit Sistem	Nilai	330,5	332,5	330,5	
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	52,05	52,05	52,05	tercapai
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	21,61	11,23	21,61	tercapai
PERENCANAAN					
Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Kategori/ Nilai	42,19	47	43,15	
PENGHUBUNG					
Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	3	3	3	tercapai
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	76,87	78,38	76,87	
Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100	100	100	tercapai
NON URUSAN					

INDIKATOR	SATUAN	Realisasi 2023	Target PRKPD 2024	Realisasi sd TW III	ket
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	78,15	tercapai

Sumber: Data olahan Bappeda 2024

Sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat Daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 19 indikator yang telah tercapai targetnya di 2024.

3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Adapun capaian pelaksanaan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2024 secara ringkasan ada pada tabel 3.5 dan secara terperinci per Perangkat daerah ada dalam lampiran buku hasil evaluasi RKPD TW III tahun 2024.

Tabel 3.5
Rangkuman Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulan III-2024

SKPD/Sub Unit/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahunan		Target Triwulan		Realisasi Triwulan		Capaian Triwulan			Realisasi s/d Triwulan Ini		Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinerja Organisasi / Permasalahan
	(%)	Output	(%)	Output	(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
3	4	5	7	8	10	11	13	14		15	16	18	19	20
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	95,30	480.095	31,56	69.336	31,07	28.506	98,45	85,96		81,81	272.906	85,85	74,26	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (UNIT INDUK)	98,65	470.786	31,56	66.865	31,07	27.729	98,45	86,03		81,81	270.233	82,93	74,37	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK	56,37	3.177	34,10	442	7,33	361	21,50	99,76		42,11	375	74,71	52,34	KURANG
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG	100,00	97	45,43	41	42,78	33	94,18	77,23		77,25	72	77,25	72,59	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KOTA CILEGON, KOTA SERANG DAN KAB. SERANG	100,00	1.716	40,80	594	16,60	36	40,68	76,92		37,45	1.118	37,45	55,51	KURANG
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KABUPATEN TANGERANG	100,00	1.548	25,83	506	12,97	7	50,20	15,04		27,22	29	27,22	17,60	KURANG
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN WILAYAH KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN	100,00	1.099	41,93	349	40,84	312	97,38	84,24		83,25	730	83,25	75,19	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM	100,00	42	19,54	9	62,25	9	318,63	74,84		50,59	20	50,59	35,53	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	100,00	1.630	39,30	530	12,89	19	32,81	43,34		30,29	329	30,29	17,71	KURANG
DINAS KESEHATAN	100,00	3.783	25,09	883	22,83	498	90,99	76,02		68,09	2.246	68,09	50,72	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KESEHATAN (UNIT INDUK)	100,00	2.540	24,87	510	22,61	388	90,93	64,71		72,12	1.799	72,12	43,41	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPT RSUD BANTEN	100,00	17	27,05	6	26,38	6	97,55	86,55		60,12	13	60,12	64,89	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPT RSUD MALINGPING	100,00	557	22,38	149	16,84	52	75,24	109,43		60,64	251	60,64	61,52	BAIK
UPTD PELATIHAN KESEHATAN	100,00	455	22,53	158	18,47	32	81,97	55,50		50,75	95	50,75	29,12	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

SKPD/Sub Unit/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahunan		Target Triwulan		Realisasi Triwulan		Capaian Triwulan			Realisasi s/d Triwulan Ini		Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinerja Organisasi / Permasalahan
	(%)	Output	(%)	Output	(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	100,00	214	26,68	60	26,57	19	99,59	234,30		82,96	87	82,96	92,00	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	100,00	6.693	25,49	1.289	25,07	1.136	98,33	73,65		64,41	2.939	64,41	44,41	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (UNIT INDUK)	100,00	3.361	25,81	319	25,24	202	97,81	65,34		60,31	340	60,31	37,65	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG-CIDANAU	100,00	243	28,75	53	28,39	53	98,73	83,08		79,64	189	79,64	66,47	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN-CISADANE	100,00	184	23,50	60	23,51	60	100,03	87,49		85,50	157	85,50	62,81	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIMAN-CISAWARNA	100,00	211	23,34	42	22,95	42	98,34	123,74		80,81	180	80,81	52,62	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN TANGERANG	100,00	601	28,67	205	28,67	205	99,99	113,50		90,20	454	90,20	73,82	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SERANG-CILEGON	100,00	849	25,82	255	25,81	255	100,00	99,51		73,62	685	73,62	58,34	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PANDEGLANG	100,00	672	29,80	195	29,80	159	100,00	91,58		80,16	480	80,16	74,34	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN LEBAK	100,00	506	25,99	151	26,36	151	101,41	73,39		80,36	396	80,36	52,07	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGUJIAN BAHAN, KONSTRUKSI BANGUNAN DAN INFORMASI KONSTRUKSI	100,00	66	20,51	9	20,30	9	98,94	89,19		89,50	57	89,50	69,46	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100,00	3.384	19,24	703	18,81	621	97,77	23,59		31,55	997	31,55	7,80	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	100,00	1.635	22,74	582	26,01	262	114,39	98,23		76,86	848	76,86	74,64	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	100,00	32.992	21,86	3.217	24,18	3.216	110,62	95,06		74,57	8.711	74,57	61,01	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS SOSIAL	100,00	75.915	15,53	4.000	15,14	204	97,47	67,96		65,11	25.860	65,11	40,18	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS SOSIAL (UNIT INDUK)	100,00	74.573	14,71	3.946	14,57	160	99,05	77,34		60,43	25.761	60,43	45,07	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PERLINDUNGAN SOSIAL	100,00	711	17,82	14	18,54	44	104,04	94,38		87,66	99	87,66	49,61	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

SKPD/Sub Unit/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahunan		Target Triwulan		Realisasi Triwulan		Capaian Triwulan			Realisasi s/d Triwulan Ini		Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinerja Organisasi / Permasalahan
	(%)	Output	(%)	Output	(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
UPTD PANTI SOSIAL REHABILITASI TUNA SOSIAL	100,00	631	19,84	40	17,43	0	87,82	12,22		85,94	0	85,94	4,14	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	100,00	38.263	19,89	12.615	23,24	9.933	116,84	126,64		77,47	26.667	77,47	74,65	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI (UNIT INDUK)	100,00	35.293	21,28	11.678	26,21	9.472	123,17	84,55		76,50	25.062	76,50	59,82	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD LATIHAN KERJA	100,00	2.657	16,56	866	15,35	443	92,73	294,32		83,45	1.488	83,45	118,55	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA CILEGON DAN KOTA SERANG	100,00	70	11,48	18	13,80	10	120,18	73,16		91,04	42	91,04	89,72	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SERANG, KABUPATEN PANDEGLANG DAN KABUPATEN LEBAK	100,00	94	9,53	21	5,83	4	61,21	116,96		86,76	9	86,76	87,25	BUTUH PERBAIKAN
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN TANGERANG	100,00	73	14,20	15	17,63	1	124,19	54,14		70,83	23	70,83	61,49	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG DAN KOTA TANGERANG SELATAN	100,00	76	17,14	18	21,93	3	127,96	53,94		81,40	43	81,40	62,31	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	100,00	2.736	19,51	1.554	19,48	32	99,82	132,09		77,81	124	77,81	67,69	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA (UNIT INDUK)	100,00	2.450	19,46	1.535	19,31	32	99,24	134,22		77,85	120	77,85	68,67	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	100,00	286	21,38	19	24,96	0	116,74	66,89		76,79	4	76,79	35,36	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KETAHANAN PANGAN	100,00	968	28,26	291	32,88	287	116,37	76,31		73,22	642	73,22	46,71	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KETAHANAN PANGAN (UNIT INDUK)	100,00	852	28,29	265	32,99	265	116,60	75,59		73,46	583	73,46	46,72	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	100,00	116	24,69	26	22,27	22	90,18	134,11		49,56	59	49,56	45,99	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	100,00	4.144	21,69	794	20,84	580	96,07	129,53		70,76	1.872	70,76	69,56	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (UNIT INDUK)	100,00	2.715	22,41	523	22,01	404	98,22	123,62		70,90	1.372	70,90	70,03	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

SKPD/Sub Unit/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahunan		Target Triwulan		Realisasi Triwulan		Capaian Triwulan			Realisasi s/d Triwulan Ini		Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinerja Organisasi / Permasalahan
	(%)	Output	(%)	Output	(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH LEBAK DAN TANGERANG	100,00	450	21,64	29	8,48	7	39,19	85,80		45,19	26	45,19	35,32	KURANG
CABANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH PANDEGLANG, SERANG, DAN CILEGON	100,00	192	21,06	60	14,77	12	70,10	221,44		47,71	36	47,71	67,85	BAIK
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	100,00	137	9,44	15	9,44	12	100,01	99,60		86,48	106	86,48	83,84	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	100,00	306	27,52	25	21,45	11	77,93	76,82		64,30	58	64,30	59,68	BAIK
UPTD PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN	100,00	344	9,05	142	8,09	134	89,38	425,81		82,62	274	82,62	74,21	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	98,81	5.492	21,23	665	19,36	655	91,17	81,49		74,77	5.348	75,67	56,76	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PERHUBUNGAN	100,00	1.988	20,68	122	21,10	97	102,04	40,34		69,22	683	69,22	26,38	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PERHUBUNGAN (UNIT INDUK)	100,00	1.862	20,71	96	21,15	85	102,11	40,62		69,11	594	69,11	26,47	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN	100,00	126	17,11	26	16,05	13	93,85	5,61		79,71	89	79,71	17,80	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	100,00	1.148	17,75	281	21,04	137	118,51	95,30		74,42	512	74,42	50,98	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	100,00	9.676	28,70	3.485	28,50	1.190	99,31	63,20		73,20	2.656	73,20	55,85	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	100,00	2.832	25,24	865	26,70	346	105,78	66,55		86,65	1.497	86,65	51,26	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	100,00	1.522	9,46	175	10,89	86	115,16	238,49		84,19	539	84,19	64,04	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA (UNIT INDUK)	100,00	1.377	8,51	141	9,68	73	113,74	276,60		85,44	512	85,44	68,00	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PEMBINAAN DAN PELATIHAN OLAH RAGA	100,00	145	17,98	34	21,79	13	121,20	82,50		72,91	27	72,91	28,78	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100,00	157.197	23,11	37.352	27,15	11.566	117,48	71,11		74,92	55.587	74,92	55,96	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	3.206	23,76	1.065	20,79	782	87,52	85,20		54,43	1.900	54,43	49,11	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

SKPD/Sub Unit/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahunan		Target Triwulan		Realisasi Triwulan		Capaian Triwulan			Realisasi s/d Triwulan Ini		Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinerja Organisasi / Permasalahan
	(%)	Output	(%)	Output	(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (UNIT INDUK)	100,00	1.735	21,93	594	21,44	577	97,77	92,74		67,18	1.150	67,18	59,96	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN WILAYAH UTARA	100,00	630	21,36	256	20,95	51	98,10	106,40		31,30	307	31,30	32,83	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
CABANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN WILAYAH SELATAN	100,00	325	20,90	66	16,77	59	80,23	29,30		19,50	186	19,50	9,48	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	100,00	166	37,18	50	36,56	10	98,35	49,22		88,95	98	88,95	50,30	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT	100,00	142	38,94	72	20,86	75	53,55	94,66		47,60	128	47,60	56,96	KURANG
UPTD PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LABUAN	100,00	208	8,61	27	11,91	10	138,39	278,79		50,15	31	50,15	58,70	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PARIWISATA	98,73	7.054	33,03	3.535	33,96	3.520	102,81	62,86		81,27	8.729	82,31	53,55	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PERTANIAN	98,53	45.990	23,36	433	23,05	327	98,67	84,28		63,31	1.102	64,25	57,37	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PERTANIAN (UNIT INDUK)	97,76	2.106	23,06	220	22,75	152	98,62	82,87		65,75	558	67,26	59,01	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	100,00	617	28,55	94	65,64	72	229,91	74,33		87,29	291	87,29	47,29	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	100,00	43.044	25,08	64	33,33	61	132,88	103,42		63,19	163	63,19	62,68	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGUJIAN PAKAN DAN PEMBIBITAN TERNAK	100,00	99	23,48	20	16,39	11	69,81	89,22		44,56	33	44,56	44,55	BUTUH PERBAIKAN
UPTD PELAYANAN DAN PENGUJIAN VETERINER	100,00	124	27,15	35	21,26	31	78,28	87,06		37,06	57	37,06	41,92	BAIK
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	96,07	8.746	33,53	4.136	31,38	4.120	93,58	81,59		78,01	4.299	81,20	60,82	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	100,00	2.770	21,34	765	23,62	13.897.921	110,68	79,39		66,58	13.898.612	66,58	176,67	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (UNIT INDUK)	100,00	1.633	21,73	438	24,90	173	114,62	70,20		68,88	721	68,88	206,97	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	100,00	944	20,31	261	19,02	229	93,64	120,10		50,48	294	50,48	40,39	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

SKPD/Sub Unit/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahunan		Target Triwulan		Realisasi Triwulan		Capaian Triwulan			Realisasi s/d Triwulan Ini		Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinerja Organisasi / Permasalahan
	(%)	Output	(%)	Output	(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN STANDARDISASI INDUSTRI	100,00	193	21,41	66	19,35	13.897.519	90,35	124,14		71,85	13.897.597	71,85	48,99	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
SEKRETARIAT DAERAH	100,00	2.236	21,02	577	24,12	322	114,72	89,31		72,80	1.172	72,80	63,99	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	100,00	69	8,97	14	8,97	17	99,99	10,41		90,32	27	90,32	61,50	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BIRO HUKUM	100,00	195	24,60	47	26,68	47	108,48	90,35		82,99	156	82,99	55,98	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	100,00	54	29,21	128	68,18	40	233,45	52,62		73,52	106	73,52	33,34	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN	100,00	1.005	22,40	168	25,66	23	114,58	94,89		70,86	221	70,86	65,45	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	100,00	362	17,20	99	17,19	88	99,93	102,28		79,98	291	79,98	74,79	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	100,00	124	28,38	34	29,53	34	104,06	48,04		77,64	54	77,64	38,42	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL	100,00	427	23,18	87	24,40	73	105,25	93,61		79,10	317	79,10	60,95	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
SEKRETARIAT DPRD	100,00	3.498	26,71	986	29,69	6	111,15	74,21		81,05	1.882	81,05	60,97	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100,00	921	22,14	166	20,93	144	94,53	91,76		74,73	521	74,73	59,21	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100,00	928	26,61	186	26,61	163	100,02	103,53		57,64	372	57,64	83,29	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN PENDAPATAN DAERAH	100,00	35.273	20,56	8.596	20,56	2.865	100,02	104,08		74,56	15.782	74,56	65,91	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN PENDAPATAN DAERAH (UNIT INDUK)	100,00	12.159	21,22	2.783	21,01	2.311	99,03	105,63		76,05	8.919	76,05	68,16	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERANG	100,00	259	21,42	57	21,42	57	100,00	100,31		79,54	192	79,54	65,67	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKANDE	100,00	201	23,10	50	23,09	50	99,97	73,16		79,97	145	79,97	47,00	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PANDEGLANG	100,00	21.034	21,60	5.304	21,59	74	99,99	98,32		79,57	5.411	79,57	75,05	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

SKPD/Sub Unit/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Tahunan		Target Triwulan		Realisasi Triwulan		Capaian Triwulan			Realisasi s/d Triwulan Ini		Capaian Terhadap Target Tahunan		Predikat Kinerja Organisasi / Permasalahan
	(%)	Output	(%)	Output	(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)		(%)	Output	Kinerja (%)	Anggaran (%)	
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RANGKASBITUNG	100,00	159	22,18	44	22,66	41	102,15	86,81		88,93	127	88,93	51,03	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MALINGPING	100,00	207	20,49	57	28,52	57	139,20	100,92		74,07	145	74,07	55,97	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT	100,00	65	17,51	12	16,94	10	96,73	0,00		85,15	45	85,15	7,22	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SERPONG	100,00	199	20,53	40	20,21	28	98,48	85,07		79,21	122	79,21	59,77	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA	100,00	218	21,25	49	21,23	49	99,92	88,29		84,34	148	84,34	59,92	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL	100,00	107	22,10	27	21,72	27	98,28	96,27		84,35	83	84,35	67,98	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEDUG	100,00	216	18,61	50	18,10	41	97,24	96,54		77,73	109	77,73	43,08	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH CILEGON	100,00	209	20,65	49	21,23	49	102,81	91,62		83,02	148	83,02	62,89	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KELAPA DUA	100,00	240	22,06	74	27,32	71	123,84	172,76		85,76	188	85,76	59,68	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	100,00	7.886	20,31	77	24,88	10	122,47	87,51		77,81	756	77,81	58,24	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	100,00	6.867	31,51	1.700	29,33	6	93,10	40,56		72,34	796	72,34	555,38	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN PENGHUBUNG	100,00	234	22,67	44	23,86	39	105,22	92,86		76,04	159	76,04	64,66	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
INSPEKTORAT	100,00	270	26,36	81	26,26	82	99,63	72,68		69,62	202	69,62	60,74	ISTIMEWA / SANGAT BAIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100,00	2.625	3,00	574	2,81	532	93,73	2.599,90		97,34	3.316	97,34	91,02	ISTIMEWA / SANGAT BAIK

BAB IV
ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Triwulan III 2024

Berdasarkan pada bab III indikator kinerja daerah menunjukkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2024 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, adapun capaian Indikator Makro yang berprogress adalah LPE dan IPM, dan 3 indikator telah tercapai yaitu TPT, Gini Ratio dan Tingkat kemiskinan. Dari 33 indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten ada 18 indikator masih berprogress untuk mencapai kinerja sesuai target.

Beberapa hal yang bisa di analisis dari proses pencapaian target di tahun 2024 ini, tujuan/sasaran daerah perlu penguatan adalah capaian makro daerah LPE dan IPM dan capaian yang berhubungan dengan pencapaian misi Tata Kelola Pemerintahan seperti . Hal ini perlu dikuatkan dengan komitmen pimpinan dan fokus pada indikator yang progress pencapaiannya masih belum mendekati target 2024.

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target RKPD - P 2024	Realisasi s/d Tw III 2024	Ket
Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	nilai	53,56	63,46	53,56	Progress
Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	persen	7,12	7,75	7,12	Progress
Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	tahun	9,15	9,23	9,15	Progress
dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	tahun	13,09	13,93	13,09	Progress
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	tahun	74,77	74,8	74,77	Progres

Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/ Sasaran	satuan	Realisasi Tahun 2023	Target RKPD - P 2024	Realisasi s/d Tw III 2024	Ket
	Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	persen	20	23,00	24	Progres
Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	nilai	92,18	93,35	92,18	Progress
Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	nilai	51,41	56,23	51,41	Progress
	Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	nilai	49,28	50,17	49,28	Progress
Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,81	4,8-5,0	4,70	progress
	Indeks Gini	nilai	0,368	0,365	0,353	Progress
Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	persen	3,43	4,92	3,43	Progress
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	persen	5,82	5,82	-0.39	progres
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	persen	0,14	0,80	-5,65	Progress
Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	persen	14,82	18,00	14,82	Progress
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	nilai	63,52	63,5	62,52	progress
Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	nilai	67,74	73,16	69,23	Progress
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	nilai	77,012	84,30	77,012	Progress

4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

A. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi kinerja yang tersedia di Bab III, menunjukkan bahwa dari total Kinerja Urusan atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024

sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat Daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 19 indikator yang telah tercapai targetnya di 2024. Adapun hal-hal yang perlu di perkuat dalam rangka mencapai target kinerja 2024 adalah belanja yang mendukung prioritas dan target PD perlu dikuatkan dan di lakukan inovasi sehingga capaian kinerjanya bisa mencapai target. PD berfokus pada penghitungan kinerja sesuai dengan penghitungan DO (Definisi Operasional). Komitmen pimpinan juga perlu diperkuat dalam rangka pengendalian kinerja PD dan memperkuat strategi serta recnana aksi kinerja untuk mencapai target kinerja pada 2024.

B. Berdasarkan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Realisasi kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan III tahun 2024 berdasarkan capaian keuangan, berikut hasil realisasi APBD TW III 2024 yaitu untuk Pendapatan Asli Daerah dengan pagu 11,74 Triliun terealisasi 8,10 Triliun atau sebesar 69,04 persen sedangkan belanja daerah dengan pagu Rp 11.86 T,- dengan realisasi Rp 6,89 T atau sebesar 58,14 persen di TW III 2024. Berikut program yang realisasi keuangannya belum optimal antara lain:

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi Anggaran		Realisasi kinerja	Perangkat Daerah
		Rp	(%)		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	99.690.000,00	6.492.340,00	6,51	24,75	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	13.810.946.700,00	1.635.318.095,00	11,84	56,23	DPUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	5.016.278.300,00	432.840.500,00	8,63	75,01	DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.465.475.300,00	607.774.200,00	24,65	95,26	DPUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	27.393.542.400,00	5.538.846.300,00	20,22	41,51	DPUPR

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi Anggaran		Realisasi kinerja	Perangkat Daerah
		Rp	(%)		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	35.687.157.348,00	7.460.550.457,00	20,91	74,17	DPRKP
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.287.818.653,00	1.766.248.220,00	19,02	53,47	DPRKP
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	320.465.785.148,00	3.720.138.852,00	1,16	22,39	DPRKP
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	12.503.047.600,00	3.858.439.760,00	30,86	90,03	DINSOS
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	247.685.900,00	69.321.498,00	27,99	81,69	DISNAKER
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	5.459.004.000,00	1.187.581.874,00	21,75	83,93	KETAPANG
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.475.000.000,00	168.496.200,00	11,42	11,71	KETAPANG
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.000.000,00	0,00	-		DLHK
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	65.000.000,00	0,00	-		DLHK
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	64.588.526.280,00	21.728.110.981,00	33,64	63,11	DISHUB
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.720.000.000,00	392.280.195,00	22,81	77,92	DISHUB
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.226.053.000,00	384.415.250,00	17,27	61,99	DISHUB
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.550.339.295,00	595.688.782,00	23,36	76,09	DINKOPUKM
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.625.000.000,00	328.845.550,00	12,53	36,44	DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	7.100.000.000,00	2.226.559.100,00	31,36	85,74	DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.666.677.000,00	496.639.000,00	29,80	77,58	DPMPTSP
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.550.966.000,00	852.887.175,00	33,43	56,94	DISKOMINFO
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.615.652.800,00	340.117.600,00	21,05	28,51	DINDIKBUD
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.610.673.200,00	734.409.438,00	28,13	46,44	DINDIKBUD
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.846.632.000,00	929.450.100,00	32,65	61,76	DISPERTAN
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	719.690.400,00	118.463.800,00	16,46	15,67	DESDM

Urusan/Perangkat Daerah/Program	Pagu	Realisasi Anggaran		Realisasi kinerja	Perangkat Daerah
		Rp	(%)		
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.196.700.000,00	241.421.708,00	20,17	72,15	BIRO EKBANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	30.036.313.090,00	9.741.072.837,00	32,43	71,38	BPSDM
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.202.355.966,00	499.617.950,00	22,69	22,69	BAPPEDA

4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2024 pada triwulan III secara umum disampaikan permasalahan dan tindaklanjut yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Program	Perangkat Daerah	Permasalahan/kendala	Tindak lanjut/solusi
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	Kinerja pada kegiatan ini sudah dilaksanakan seperti penerbitan ijin operasional sekolah pada beberapa sekolah SMK : 60 sekolah, namun secara penyerapan keuangan akan dilaksanakan pada triwulan 4 Salah satu kendala dalam penerbitan ijin operasional sekolah swasta adalah hampir semua sekolah swasta tidak memiliki IMB.	Menunggu sekolah menyelesaikan administrasi dalam penerbitan IMB, baru dilaksanakan penerbitan izin
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPR	1. Paket Pekerjaan SID Kekeringan belum selesai, namun durasi waktu sudah berakhir, Baru sampai Lap antara. 2. Pembebasan lahan SPAM Karian Timur, SK Penlok Akhir Juli 2024, Koordinasi dengan BPN Kab Lebak, Pemerintah Kecamatan Maja, Kec Warunggunung dan Kec. Rangkas Bitung. 3. rapat pembinaan Air Minum baru terlaksana 2x. 4. OP WTP Sindangheula baru terlaksana Pemeliharaan, namun belum beroperasi.	1. Angka realisasi anggaran dan realisasi kinerja akan ditinjau kembali pada aplikasi SIMAKIP. 2. Paket pekerjaan SID Kekeringan per 30 Sept 2024 Laporan penduluan dan sudah dibayar termin 3. pemenuhan persyaratan ke Kanwil BPN Prov Banten. 4. Rencana rapat pembinaan Air Minum 1x pada TW 4 dengan Kota Tangsel. 5. Untuk melaksanakan Operasional WTP Sindangheula dilakukan Asessment Mekanikal Elektrikal dan Automasi (SCADA) sistem dalam WTP Sindangheula dilaksnakan TW 4. Pada APBD Murni 2025 dilaksanakan Pembaharuan Automasi dan ME

Program	Perangkat Daerah	Permasalahan/kendala	Tindak lanjut/solusi
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DPUPR	1. Rapat Pembinaan TPA/TPST sdh terlaksana 2 dari 8 kali sd TW 2. 2. Per 30 Sept 2024 Expose Lap Akhir Studi Kelembagaan pengelola TPST, pembayaran bulan Okt 24. Studi Pengurangan Sampah sd Lap Antara, pembayaran Termin 1 (30%). 3. Adanya perubahan kebijakan pimpinan semula lokasi TPST Regional di Kec Maja, menjadi di Kec. Cileles Kab Lebak. Masih ada fasilitasi perjalanan dinas.	1. Angka realisasi anggaran dan realisasi kinerja akan ditinjau kembali pada aplikasi SIMAKIP. 2. Rapat Pembinaan persampahan direncanakan 1x lagi, belanja NS diterapkan bersamaan acara ekspose AMDAL TPST Cileles. 3. TW 4 Studi Pengurangan Sampah dan Studi Kelembagaan TPA regional sudah selesai dibayarkan. 4. Dokumen Perencanaan TPST Cileles (Masterplan, DED dan AMDAL) dianggarkan pada APBD Perubahan 2024.
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPUPR	1. Rapat Pembinaan Air Limbah sdh terlaksana 1 dari 8 kali. 2. Tahun 2024 dilaksanakan 2 paket perencanaan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL) dan FS IPAL. Sd 30 sept 2024 sdh terlaksana Expose Lap Antara RISPAL, namun pembayaran dilaksnakan bulan Okt 2024. FS sudah Expose Lap Pendahuluan dan Pembayaran Termin 1.	1. Angka realisasi anggaran dan realisasi kinerja akan ditinjau kembali pada aplikasi SIMAKIP. 2. Pada APBD Perubahan 2024 anggran rapat pembinaan Air Limbah dioptimalisasi (Rp 0,-) 3. Pada TW 4 dilaksanakan
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DPUPR	1. Pembangunan Pasar induk tidak dilaksanakan; Pembangunan Gedung Bank Banten baru dibayarkan Uang Muka Kerja 2. Penyusunan AMDAL pasar Induk hanya sampai Lap Pendahuluan; 2 paket DED PBL tidak dilaksanakan 3. Pengawasan Pasar Induk tidak dilaksanakan; Pengawasan Penataan Pendopo Gubernur (Kubah Pendopo) tidak dilaksanakan. Pengawasan Pembangunan Gedung Bank Banten tidak mengajukan Pembayaran karena Progress Fisik belum memenuhi syarat pembayaran termin 1.	1. Pembangunan Pasar Induk pada APBD Perubahan dihilangkan (Rp 0,-); Progress Pembangunan Gedung Bank Banten per 30 Sept 2024 belum mencapai syarat untuk pembayaran Termin 1. 2. Pada APBD P Anggaran Penyusunan AMDAL Pasar Induk berkurang Rp 614.223.000; Untuk Paket DED PBL anggaran dihilangkan (Rp 0,0) pada APBD P. 3. Pada APBD P Anggaran Pengawasan Pasar Induk tidak dilaksanakan; Pengawasan Penataan Pendopo Gubernur (Kubah Pendopo) dihilangkan (Rp0,-); Pengawasan Pembangunan Gedung Bank Banten baru dibayarkan Uang Muka Kerja.
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DPRKP	pelaksanaan kinerja sudah menunggu penyelesaian administrasi keuangan	percepatan penyelesaian administrasi di keuangan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DPRKP	pelaksanaan kinerja sudah menunggu penyelesaian administrasi keuangan	percepatan penyelesaian administrasi di keuangan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DPRKP	terkendala lokasi pembangunan PSU yang di dalam DPA tidak di rincikan sehingga memepersulit proses pelaksanaan	lokasi di pastikan di TW IV agar pengerjaan proyek dpat segera diilksanakan

Program	Perangkat Daerah	Permasalahan/kendala	Tindak lanjut/solusi
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS	Bantuan UEP itu 740 org x Rp. 2.500.000 = 1.850.000.000 Bantuan Stunting : 4.295 org x 60 kali x Rp. 27.750 = Rp. 7.151.175.000 Bansos bagi Penyandang Disabilitas : 600 org x Rp. 500.000 = Rp. 300.000.000 Bansos bagi Anak : 600 org x Rp. 500.000 = Rp. 300.000.000 Bansos bagi Lanjut Usia : 600 org x Rp. 500.000 = Rp. 300.000.000 Bansos Ekstrem : 35.000 KK x Rp. 500.000 = 17.500.000.000 Alat Bantu bagi Lanjut Usia : Rp. 2.022.750.000	Pelaksanaan kegiatan berupa penyaluran bantuan ke masyarakat akan dilaksanakan setelah Pilkada barang sudah ada, proses pengadministrasian telah berproses.
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DISNAKER	pada aktivitas penyusunan rencana tenaga kerja makro, fasilitasi penyusunan RTK dan terlaksananya fasilitasi penyusunan RKT penyerapana nagaran belum signifikan, krn pelaksanaan di tgl 3 oktober masuk di TW IV	pelaksanaan kegiatan di TW IV
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	KETAPANG	terdapat pembelian beras yang kontraknya sudah, namun realisasi keuangannya ada di TW IV, setelah di simpan ke BULOG	pelaksanaan kegiatan di TW IV,
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	KETAPANG	terdapat pembelian bahan makanan yang dibagikan ke masyrakat dan di realsiasikan pada TW IV dan terdapat anggaran yang di recofusing	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLHK	anggaran di recofusing	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	DLHK	anggaran di recofusing	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB	telah dilaksanakan kinerjanya namun pengadministrasian keuangan masih menunggu penyelesaian	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DISHUB	telah dilaksanakan kinerjanya namun pengadministrasian keuangan masih menunggu penyelesaian	
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	DISHUB	telah dilaksanakan kinerjanya namun pengadministrasian keuangan masih menunggu penyelesaian	

Program	Perangkat Daerah	Permasalahan/kendala	Tindak lanjut/solusi
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINKOPUKM	kendala kegiatan pengembangan ekspor menyingkronkan dengan kegiatan inkubasi perubahan jadwal pameran tingkat nasionalpenubuhan dan pengembangan kewirausahaan sudah dilaksanakan dan sisa anggaran di alihkan keperubahan Fasilitas Inkubator Usaha Kecil (APBD) sudah tahap pendampingan dani inkubasi usaha kecil sektor kerajinan sudah sampai tahap pendampingan	Fasilitas Inkubator Usaha Kecil (APBD) sudah tahap pendampingan dani inkubasi usaha kecil sektor kerajinan sudah sampai tahap pendampingan pameran nasional ada dua lokasi yang akan dilaksanakan tanggal 14-16 november dan tanggal 28-01 desember dialihkan ke kegiatan orientasi ekspor Fasilitas Inkubator Usaha Kecil (APBD) sudah tahap pendampingan dani inkubasi usaha kecil sektor kerajinan sudah sampai tahap pendampingan dan akan dilaksanakan di bulan desember 2024
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	pelaksanaan 5 kajian, ada kajian yang awalnya lelang dialihkan ke penunjukan langsung ke universitas.	akan diselesaikan pengadministrasiannya di bulan november dan desember
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	anggaran masih diselesaikan di bulan november, kegiatan telah terlaksana	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	anggaran masih diselesaikan di bulan november, kegiatan telah terlaksana	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DISKOMINFO	terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu diskusi pakar anggaran di rasionalisasi bimbingan teknis untuk Aparatur tidak dilaksanakan, dilakukan rasionalisasi anggaran	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINDIKBUD	Program tersebut belum terserap secara optimal karena dibutuhkan SK Tim Kebudayaan yang berisi ahli-ahli budaya yang perlu di tandatangani oleh Kepala daerah, sehingga kegiatan dengan pagu anggaran terbesar pada program tersebut belum dapat dilaksanakan Pada Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya spj masih ada di keuangan /realisasi keuangan belum terinput pada aplikasi keuangan, namun secara kinerja sudah dilaksanakan seperti Festival dalang Anak, FDA Nasional, dan festival Cagar Budaya.	
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DINDIKBUD	Pada pengelolaan museum provinsi spj masih ada di keuangan /ealisasi keuangan belum terinput pada aplikasi keuangan, namun secara kinerja sudah dilaksanakan seperti festival malam, pagelaran seni taman budaya dan pameran seni budaya.	percepatan penyelesaian administrasi di keuangan

Program	Perangkat Daerah	Permasalahan/kendala	Tindak lanjut/solusi
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DISPERTAN	anggaran di reconfusing sebesar 200juta. Anggaran tersebut adalah pemberian sumur pantek kepada masyarakat karena sudah ada pemberian irigasi perpipaan dari sumebr dana APBN	pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada program ini akan terrealisasi di TW IV
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	DESDM	Penyusunan Dokumen Pra Feasibility Study (Pra FS) Bahan Bakar Jumputan Padat dan Jasa Konsultansi DED PLTS Rooftop kontraknya di bulan oktober dan penyelesaian kinerjanya di Desember	segera diseleasikan di TW IV baik kinerja maupun anggaranya
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO EKBANG	Hambatan ada di KDKEs dan Anggaran Aspirasi, dimana Anggaran Aspirasi di Perubahan di hilangkan. Anggaran KDEKS menyesuaikan dengan kebutuhan TIM KDEKS dan pada perubahan tidak boleh di kurangi pagu nya	koordinasi lebih lanjut
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BPSDM	dikalt sudah dilaksanakan, pengadministrasian keuangan sedang berjalan dan lewat triwulan	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPEDA	terdapat honor tim Kajian yang belum terbayarkan pada sub kegiatan kajian ekbang, dan kajian Teknokratik RPJMD yang belum dibayarkan honor nya	akan segera dibayarkan honor-honor tim untuk kajian tersebut

BAB V

PENUTUP

Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2024 yang merupakan komitmen dalam mengawal pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2023-2026 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengukuran capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran Daerah, Sasaran PD, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Perangkat Daerah berdasarkan Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, diharapkan menjadi input dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi atas kinerja yang hasilnya untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan periode selanjutnya.

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2024 pada Triwulan III secara umum belum dijumpai adanya kendala yang berarti. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan belum dapat direalisasikan karena memang masih dalam fase persiapan pelaksanaan kegiatan. Perangkat daerah selaku pelaksana Program Kegiatan mengupayakan agar pencapaian target kinerja dapat dipenuhi secara berkualitas dan tepat waktu.

Urgensi pengendalian kinerja adalah bagaimana Perangkat daerah dari kinerja yang dilakukan di kegiatan dan sub kegiatan dapat mendukung penuh pencapaian kinerja utama Perangkat Daerah dan tercapainya Tujuan Daerah. Pada TW III ini yang perlu di fokuskan adalah pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Dimana hasil Triwulan III menunjukan kinerja pelambatan dibanding tahun sebelumnya. Ada juga TPT yang baik secara kinerja namun jika dibandingkan Provinsi lain kita masuk ke rangking 1 kembali. Kinerja Kemiskinan Ekstrem dan Stunting juga perlu mendapatkan fokus kinerja yang utama untuk tahun 2024.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyelarasan dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2024 disusun, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan triwulan selanjutnya.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2024